



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TOFAN PRATAMA APRILIANTO
2. Jabatan : PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA
3. NHK : 260464

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 650.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/78 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 202.000.000

1. MOTOR, YAMAHA JUPITER Z Tahun 2006, WARISAN Rp. 2.750.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO SOUL GT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.250.000
4. MOBIL, TOYOTA KIJANG KF 70 STD Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 42.500.000
5. MOBIL, DAIHATSU XENIA 1.3 R MT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
6. MOTOR, YAMAHA FAZZIO BEJ AT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 21.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 12.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 8.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 872.000.000

III. HUTANG Rp. 360.197.350

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 511.802.650



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.